

# NAHDLATUL ULAMA MENGABDI UNTUK BANGSA



Ahmad Hasyim Muzadi  
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pengembangan dakwah Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para wali dalam mengajarkan Islam. Cara-cara akulturatif dalam berdakwah menjadi pintu masuk bagaimana Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat. Begitu Islam diterima oleh masyarakat, maka tugas lebih lanjut adalah memberikan pendalaman pemahaman Islam kepada warga. Dan kehadiran pesantren merupakan salah satu upaya memberikan pendalaman pemahaman agama kepada warga.

Pesantren ini juga dilengkapi dengan kurikulum khas yang hampir sama di semua pesantren. Keteladanan kiai menjadi ciri khas pesantren dalam

menggembleng para santri untuk mendalami Islam. Kehadiran pesantren inilah dalam rangka mengilmiahkan orang yang baru masuk Islam. Namun dalam perkembangannya, pesantren menjadi pengemblengan pendidikan agama dan akhlak bagi warga. Seiring dengan mapannya pesantren dan kuatnya jaringan antar pesantren, maka pada tahun 1926 lahirlah *jam'iyah diniyyah Nahdlatul Ulama* yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh pesantren. Melalui *jam'iyah diniyyah* inilah, para tokoh pesantren mendakwahkan Islam dan berjuang untuk bangsa.

Dalam mendakwahkan ajaran agama, tentu saja terjadi perubahan luar biasa, bahkan dalam beberapa hal ada yang harus disesuaikan. Namun demikian, ada prinsip-prinsip yang juga patut dipertahankan. Ini artinya, di samping ada penyesuaian-penyesuaian, juga ada upaya mempertahankan. Di sinilah prinsip *al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah* (merawat tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik) menemukan relevansinya.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi keunikan *jam'iyah diniyyah NU* ini. *Pertama*, cara NU menyikapi adat.

Indonesia merupakan satu negara dengan ratusan adat. Berbeda halnya dengan negara-negara Arab yang lebih dari dua puluh negara namun mempunyai satu adat. Fakta ini tentu perlu dipertimbangkan. *Kedua*, cara NU untuk mengerti agama sehingga ia tidak kehilangan langkah historis dan tersambung dari sekarang hingga masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, generasi-generasi setelah Nabi SAW juga dihitung sebagai referensi Nahdlatul Ulama.

Dengan dua ciri pembeda inilah sesungguhnya merupakan wujud apresiasi NU terhadap realitas yang berkembang di sekitarnya. Bukannya memberangus, NU mengapresiasi sambil mengisi nilai-nilai Islam di dalamnya.

Sementara dalam aspek kebangsaan, kehadiran NU tidak lepas dari upayanya mengenyahkan penjajah di Indonesia. Resolusi Jihad yang dikobarkan Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari memicu kobaran perlawanan yang luar biasa terhadap penjajah Belanda. Perang 10 November 1945 yang digelorakan *arek* Surabaya ini dipastikan dipicu juga oleh semangat resolusi Jihad yang dihasilkan oleh ribuan kiai dan santri se-Jawa dan Madura yang dipimpin Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari di Surabaya 21-22 Oktober 1945. Salah satu poin penting Resolusi Jihad itu adalah mempertahankan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta.

Resolusi Jihad ini merupakan bentuk sumbangsih NU pada bangsa dan negara yang sangat besar, termasuk melawan penjajah dalam rangka mempertah-

ankan kemerdekaan. Dalam sejarahnya, NU selalu menggabungkan kepentingan agama dan bangsa. Paham kebangsaan atau nasionalisme ini telah menyatu dalam pemikiran keagamaan NU. Bukan malah dipisahkan antara agama dan nasionalisme. Berbeda dengan gerakan-gerakan tertentu yang bercorak aksiomatik; seakan-akan yang agama tidak nasionalis dan seakan-akan nasionalisme itu bukan bagian dari agama. Persepsi semacam ini jelas keliru. Atas dasar ini pula, NU tidak pernah terlibat dalam gerakan-gerakan yang mengadopsi paham internasionalisme meskipun itu berwarna syariat. NU tidak pernah terlibat dalam gerakan-gerakan yang mengadopsi paham internasionalisme yang bertentangan dengan kepentingan kebangsaan.

Memang, pemikiran internasional di alam demokrasi bukan serta merta ditolak. Namun demikian, meskipun NU memiliki hubungan internasional dengan pihak-pihak lain, NU tetap mempertahankan paham kebangsaan Indonesia. Salah satu bentuk upaya NU dalam mempertahankan kebangsaan adalah penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarahnya, dorongan pada Piagam Jakarta dalam perdebatan di PPKI yang didesakkan kalangan Islam sebagai mayoritas akhirnya gagal. Namun dengan semangat substansialisme inklusif yang dimiliki umat Islam, di mana NU di dalamnya, rumusan dasar negara tanpa mencantumkan Piagam Jakarta pun diterima. Karena bagi NU, Piagam Jakarta itu untuk *civil society* bukan untuk *nation state*-nya. Jadi seb-

agai umat Islam, kita berkewajiban menjalankan ajaran Islamnya. Sebagaimana agama lain, dia mesti berkewajiban menjalankan ajaran mereka masing-masing. Dengan semangat semacam ini, *nation state* tetap menjadi payung terhadap seluruh agama.

Dengan semangat semacam ini, maka NU dalam masalah negara lebih mengedepankan nilai dan tidak menggunakan formulasi yang simbolistik. Ini artinya bahwa nilai-nilai agama dibawa ke negara, dan negara yang mengemasnya dalam bentuk nasionalisme yang disepakati melalui proses demokrasi. Oleh karena itu mengapa proses penyariatan negara, misalnya akan dijadikan negara Islam, selamanya tidak akan pernah berhasil, baik melalui konstitusi atau melalui pemberontakan. Ini misalnya dilakukan DI/TII, PRRI, Permesta dan lain-lain atau yang dicoba melalui konstitusi tidak pernah berhasil. Mengapa perjuangan semacam itu tidak berhasil? Menurut saya karena tidak didukung mayoritas. Dan NU selalu berada di garda depan dalam mengawal bangsa ini, sehingga dengan demikian dalam penetapan Pancasila sebagai asas tunggal, NU yang paling awal menyetujui, karena secara substansial pesan-pesan Pancasila tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

### Memperjuangkan Islam Moderat

Dalam perjalanannya, NU selalu membuat bagaimana Islam menjadi produktif, tidak problematik. Jadi jangan terfokus pada diferensiasi. Misal-

nya, karena saya Islam maka saya harus beda dengan yang lain. Tentu cara ini tidak tepat karena akan mengambil jarak dengan komunitas lainnya. Pada hal-hal yang sama tidak perlu dibedakan. Pada hal yang beda tidak usah dipaksakan sama. Dalam konteks inilah NU membangun komitmen hubungan antar agama. Sebagaimana diketahui, isu agama sangat sering diangkat dalam kasus yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama.

Dalam lingkup nasional, NU bersama-sama agama lain di tanah air kerap melakukan komunikasi-komunikasi untuk merespon kemungkinan isu agama dikait-kaitkan dalam sejumlah konflik yang nyatanya tidak ada kaitannya dengan agama. NU secara rutin melakukan pertemuan, misalnya di gedung PBNU, dan menawarkan pola toleransi beragama dengan pendekatan moderasi. Ini artinya bahwa dengan moderasi, orang yang beragama tetap dengan keyakinannya tetapi mempunyai toleransi yang setingkat dengan keyakinannya. Sebaliknya, kalangan yang ekstrem adalah orang yang meyakini ajaran agamanya tanpa toleransi atau kurang toleransinya. Di ujung yang lain, ada kalangan yang beragama secara longgar dengan tingkat toleransi yang demikian besar sehingga mereduksi agamanya sendiri. Model beragama secara moderat inilah yang hendak diperjuangkan NU menggantikan dua model beragama lainnya, ekstrem dan liberal. Di sini, kita membuat kelompok gerakan moral nasional, yang salah satu poin pemikirannya



adalah bagaimana agama menjadi *potensi* Indonesia, bukan menjadi *masalah* Indonesia. Karena kita sadar bahwa semua agama memiliki nilai-nilai universalnya (*universal values*) dan nilai-nilai nasional (*national values*). Bahwa semua agama memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian, dan lainnya tentu tidak ada yang membantah. Begitu juga semua agama di tanah air ini juga menghendaki agar bangsa ini terhormat, bangsa ini juga memiliki integritas, dan seterusnya juga tidak ada yang bisa membantah.

Kalau mau jujur, sesungguhnya teror, tepatnya teror yang berkarakter agama, disebabkan beberapa faktor, di antaranya, *pertama*, karena faktor internal penganut agama yang selalu ada kelompok yang sangat fanatik. Kelompok ini tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Kelompok ini kerap menganggap dirinya benar dan di luar dirinya salah, atau

bahkan kafir. Pendirian semacam ini sesungguhnya yang menjadi embrio kekacauan. Dalam agama ini, kelompok ini dikenal dengan *hizbut takfiri*, kelompok yang selalu mengafirkan kelompok yang di luar dirinya. Kelompok yang 'sempalan' seperti ini memang selalu ada di setiap agama. Memang potensi teror dari kelompok semacam ini sangat kecil.

*Kedua*, karena faktor lingkungan (*bi'ah*) di mana kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan merajalela. Faktor ini sangat dominan dalam memunculkan tindakan teror dalam masyarakat. Ini misalnya dalam pertikaian global, misalnya yang terjadi antara Amerika dan Iraq. Pertikaian ini, karena melibatkan mayoritas masyarakat yang berbeda secara agama, di tanah air hal ini dianggap sebagai pertikaian antar agama. Padahal itu hanyalah perebutan minyak. Inilah yang sesungguhnya harus dijaga agar jangan sampai ada pandangan semacam itu. Jadi tokoh agama sejatinya bisa membedakan mana masalah agama dan mana masalah non-agama yang diagamakan.

Di samping dalam lingkup nasional, dalam kancah internasional NU juga berjuang untuk mengembangkan pola beragama yang moderat. Sebagai salah satu anggota *Eminent Person*, salah

satu komisi di OKI (Organisasi Konferensi Islam), saya turut berjuang untuk mewujudkan pola beragama yang moderat. Berdasarkan sejarah ke-Indonesiaan dan ke-NU-an, kita berusaha agar OKI tidak menjadi Pan Islamisme yang menghadapi dunia seakan-akan itu musuh yang harus dihadapi. Begitu juga, saya berusaha agar OKI tidak menjadi Pan Arabisme yang seakan-akan bahwa Islam dibatasi oleh kultur Arab. Upaya ini berhasil, dan kita bisa berharap bahwa apa yang diperjuangkan OKI adalah mengusung Islam yang universal, Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pengalaman dan corak beragama di Indonesia menjadi modal utama kenapa perjuangan di tingkat internasional tidak mengalami hambatan berarti. Kita harus akui bahwa visi moderasi itu milik Indonesia. Jadi sudah sangat pantas Indonesia menjadi mercusuar dari gerakan Islam moderat. Islam moderat ini artinya keseimbangan antara keyakinan agama dan toleransi agama. Kita sebagai orang Islam harus teguh memegang prinsip ajaran Islam. Aqidahnya harus mantap. Setingkat dengan teguh itu maka setingkat itulah toleransi kita kepada orang lain. Islam mengenal konsep *lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku), sementara kita ini *waliyadin* saja, *lakum dinukum*-nya tidak dipikirkan. Karena semua orang punya hak untuk berbeda dengan kita.

### **Mempertegas Identitas Jam'iyah Diniyyah**

Sebagai bagian dari rakyat Indone-

sia, kehadiran NU tidak melulu untuk kepentingan agama, tetapi juga demi kepentingan kebangsaan. Visi ke-Islaman ala *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dengan semangat kebangsaan/keindonesiaan inilah yang menjadi identitas Nahdlatul Ulama. Ketegasan identitas ini menjadi salah satu indikasi bahwa NU hadir dengan watak jam'iyah diniyyah ijtimai'iyah yang memiliki visi kebangsaan yang tegas. Di atas telah dijelaskan bagaimana NU terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan turut terlibat dalam mengisi kemerdekaan ini. Perjuangan inilah yang terus dilakoni NU dalam pengabdianya untuk bangsa Indonesia.

Memang dalam perjalanannya, NU sebagai organisasi sosial keagamaan bermetamorfosis menjadi partai politik (1952-1973). Pahit getir perjuangan NU sepanjang perannya sebagai partai politik, serta absennya peran keumatan yang diperankan menjadikan NU menyadari bahwa *jam'iyah diniyyah ijtimai'iyah* merupakan format yang paling tepat diperankan NU. Kembali ke Khittah NU 1926 menjadi pilihan dalam Mukhtamar di Situbondo 1984. Khittah NU merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hubungan NU dengan politik. Dalam konsep ini sesungguhnya tidak ada larangan NU berpolitik. Karena politik yang dimaksud adalah dalam pengertian yang lebih luas: politik kebangsaan. Secara organisasi, NU dilarang untuk berpolitik praktis karena memang bukan partai politik. Adalah kesalahan besar kalau ada yang menganggap bahwa NU tidak boleh berpolitik. Khittah itu justru

memproduksi kebebasan berpolitik, tapi politik kebangsaan, bukan politik praktis, bukan politik kekuasaan.

Sebagaimana warga negara yang lain, jama'ah NU juga memiliki hak berpolitik. Mereka diberi kebebasan dalam hal itu. Namun, mereka juga harus diberi pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Jika tidak, mereka akan lelah menghadapi setiap pemilu maupun Pilkada. Rakyat tidak bisa berdemokrasi dengan baik kalau tidak diberi pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Rakyat pasti akan lelah dan jenuh setiap menghadapi Pemilu atau Pilkada yang bisa saja terjadi setiap tahun. Selama ini, banyak kritik pedas bahkan cercaan terhadap banyaknya tokoh NU yang mencalonkan diri atau dijadikan calon dengan tuduhan tidak khittah dan bersyahwat politik. Padahal khittah dilakukan institusional dan NU sebagai organisasi tidak mungkin menghilangkan hak seorang warga negara yang kebetulan berpolitik. Yang bisa adalah mengatur mekanismenya. Jadi persoalannya bukanlah syahwat politik atau impotensi politik, namun pengaturan yang sinergis.

### **Polemik Amandemen dan Pilkada Langsung**

Dalam perjalanannya, NU dihadapkan pada sejumlah kasus kenegaraan. Sebagai bagian dari warga negara, NU tidak salah untuk turut ambil bagian dalam menyelesaikan carut-marut berbangsa. Perdebatan seputar amandemen

UUD 1945 merupakan salah satu dari akar persoalan yang melahirkan sejumlah persoalan politik di tanah air ini. Menyadari bahwa UUD dalam polemik, NU perlu melakukan kajian mendalam mengingat ini terkait dengan fondasi yang paling dasar dan perjalanan bangsa. Bukan hanya pada konstitusi, tapi juga hampir pada setiap gerakan dan aspek kenegaraan. Untuk itu ada beberapa hal yang patut dilakukan NU. *Pertama*, kita harus melihat UUD ini secara komprehensif, baik dan segi kesejarahan, ideologi negara, hukum, sosial politik, konteks ilmu tata negara, dan tidak boleh dilupakan adalah akibat yang timbul. Karena semua itu akan dirasakan oleh rakyat. Sebagai alat uji apakah sesuatu sistem ini cocok atau tidak, atau tampak tidak cocok tapi ini dalam proses, ini harus kita pilah. Karena alat uji konstitusi adalah apakah ia menghasilkan keadilan, kesejahteraan dan tata kenegaraan yang sehat atau tidak.

*Kedua*, terkait dengan upaya yang pertama, NU harus melakukan kajian komparatif perundang-undangan dan pengalaman negara lain. Misalnya reformasi yang ada di Uni Soviet dan Cina. Mengapa Cina bisa *survive* dengan reformasinya Den Xiao Ping yang meskipun awalnya komunis menjadi sosialis, kemudian sekarang beralih menjadi kapitalis, namun sistem komandonya tetap komunis. Begitu juga yang terjadi di Uni Soviet, apakah *glasnost-perestroika* yang mengubah Uni Soviet menjadi seperti sekarang ini merupakan langkah maju atau sebaliknya. Kajian komparatif ini

penting dilakukan, karena NU ingin mencari solusi yang sebaik-baiknya untuk bangsa setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh.

Sebagai bagian dari hasil amandemen UUD adalah perubahan sistem pemilihan. Sistem pemilihan kepala daerah merupakan salah satunya. Dalam perkembangannya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari perwakilan menjadi langsung, menuai pro dan kontra. Dari pengamatan di lapangan, saya melihat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung penuh masalah. Dari segi modal, seorang yang ingin maju dalam memperebutkan kepada daerah, baik tingkat II maupun tingkat I, harus mempunyai modal yang cukup besar. Jadi, jangan berharap orang tidak bermodal bisa lolos maju. Karena banyak yang harus dibayar. Di samping melalui proses legitimasi dan

legalisasi oleh partai, sang calon juga harus membiayai alat-alat kampanye.

Dari segi saya sebagai orang NU. Dalam sisi tertentu, saya sebagai pimpinan mungkin diuntungkan karena jumlah orang NU yang banyak tentu dapat diproses menjadi kekuasaan. Sekalipun dia melewati berbagai macam partai politik, tetapi di sisi lain, karena tingkat tarik-menarik dan kompetitor-kompetitor itu sangat tinggi. Fakta ini tentu saja menciptakan polarisasi di kalangan nahdliyin. Padahal tidak semua wilayah siap dengan polarisasi politik semacam itu. Sebagai pimpinan, tentu saja saya berusaha untuk menjaga agar masyarakat NU melihat pilihan tidak sebagai perpecahan, tetapi sebagai sebuah alternatif. Dengan cara pandang ini, perpecahan dapat dihindari, dan keutuhan bangsa akan terus bersemayam. []